

Pilgub dan Partisipasi Nahdliyyin

PERHELATAN pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah diikuti dua pasangan calon yang sama-sama diwakili figur belatar belakang jamaah *nahdliyyin*. Cawagub kali ini merepresentasikan eksistensi sebuah komunitas besar di Jawa Tengah sekaligus untuk kepentingan menjaga keindonesiaan yang majemuk dalam bingkai NKRI. Sehingga dalam konteks identitas mereka lebih tepat disebut pasangan nasionalis *fi religius* sebagaimana dominan di provinsi ini sejak 1950-an.

Persoalan yang terus menghantui penyelenggaraan perhelatan pemilihan gubernur sejak 2013 adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Sementara dalam dimensi praktik demokrasi elektoral maka partisipasi menjadi salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan demokrasi.

Adapun pengertian partisipasi menurut Samuel Huntington (dlm Arifin; 2003) adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Artinya tindakan individu dalam jumlah besar suara yang diberikan kepada pasangan calon merupakan wujud keinginan pribadi untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang nanti bakal direalisasikan pasangan cagub-cawagub saat memimpin pemerintahan.

Namun fakta riil sering berkebalikan, yang menjadi faktor penyebab partisipasi pemilih Pilgub dikategorikan rendah. Pertama, pemilih berdomisili dalam geopolitik yang demikian luas dari Cilacap sampai Rembang menjadikan mereka tidak merasa memiliki *personal proximity* dengan figur pasangan calon.

Oleh Muchamad Yuliyanto



Persoalan yang terus menghantui penyelenggaraan perhelatan pemilihan gubernur sejak 2013 adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih “



Dampaknya amat sulit membangkitkan emosi ataupun nalar untuk mempergunakan hak pilih. Kedua, secara administrasi pelayanan maka sebagian besar pemilih tidak pernah merasakan langsung efek pelayanan dari Pemprov. Ketiga, efek dari kebijakan publik yang diambil gubernur selaku kepala Pemprov selama ini sering tidak dirasakan langsung masyarakat, meski belakangan sudah terdapat dampak langsung

seperti kebijakan biaya SPP untuk SLTA dan SMK. Keempat, sebagian besar pemilih memahami keberadaan gubernur tidak memiliki wilayah administrasi - politik langsung seperti kabupaten/kota. Karena gubernur lebih dipahami sebagai wakil pemerintah pusat yang menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi pendampingan pembangunan daerah yang menjadi ranah kewenangan kabupaten/kota. Kelima, sentuhan kebijakan dan efeknya selama ini juga minim dirasakan langsung komunitas maupun elemen masyarakat yang tersebar luas di wilayah Jateng. Kelima, hal di atas merupakan tantangan bagi pasangan calon terpilih, sebagai fondasi meningkatkan partisipasi guna memperkuat legitimasi kepemimpinan hasil produk demokrasi elektoral.

Partisipasi Nahdliyyin

Kedua pasangan calon yang jelas terdapat representasi kader *nahdliyyin* baik yang dianalisis politik melalui PPP maupun PKB, jelas memiliki tantangan berat untuk menjawab penyebab rendahnya partisipasi tersebut. Ketika mereka mampu meyakinkan dan memberi ekspektasi kepada jamaah maka dapat diharap terdapat kenaikan partisipasi yang signifikan dengan berdasar jumlah anggota maupun simpatisan jamaahnya. Dengan argumentasi bahwa komitmen dan sejarah hidup mereka tak mungkin lepas dari keluarga besar *nahdliyyin* (NU) yang dominan dalam kehidupan sosial di wilayah Jateng. Maka sesungguhnya Pilgub 2018 ikut “menggaransikan” tanggung jawab dan komitmen jamaah *nahdliyyin* dalam menyukseskan demokrasi dan pendewasaan politik.

Oleh karenanya NU sebagai

jamiyyah meski secara organisatoris harus netral dan independen dari politik praktis, akan tetapi pada Pilgub kali ini ikut memberikan kontribusi bagi upaya mendongkrak partisipasi pemilih. Dengan argumentasi sebagai berikut: (1) siapa pun yang bakal memenangi Pilgub otomatis merupakan kemenangan salah satu tokoh dari jamaah *nahdliyyin* secara khusus, dan masyarakat Jateng pada umumnya. (2) dengan berdasar partisipasi berbasis *communal group* (dlm Ardial; 2008; 63) maka diketahui banyak individu terlibat dalam perhelatan politik karena memiliki kesamaan identitas kelompok, yakni jamaah *nahdliyyin* sebagai salah satu target besar bagi upaya meraup elektabilitas pasangan calon. (3) berdasar basis sosial partisipasi karena faksi, yang artinya individu-individu yang terlibat partisipasi karena disatukan interaksi pribadi yang sangat tinggi serta ditopang pola hubungan yang klientalistik (dlm Ardial; 63). Maka dapat diketahui target kampanye dan dinamika perhelatan Pilgub ditandai peran tokoh masyarakat maupun tokoh agama (para kyai NU) sebagai opinion leader yang diharapkan mampu memberi orientasi pilihan kepada pasangan calon. (34)

— Muchamad Yuliyanto,
dosen Komunikasi Politik FISIP
Undip, pengelola LPSI, peminat
Demokrasi dan Politik Lokal